

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH (Studi komparatif Pemerintah Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman)

Mochammad Iqbal Fadhlurrohman¹, Budiman², Etika Khairina³

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Indonesia^{1,3}

Universitas Mulawarman Indonesia²

E-mail: fadlurrohmani84@gmail.com

ABSTRAK

Hasil kinerja yang dilakukan oleh pemerintahan diperlukan adanya laporan pertanggung jawaban dari pemerintah guna melihat keberhasilan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan kinerja yang dimana untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam penelitian ini melihat apa yang menjadi faktor-faktor yang berpengaruh dari proses akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dan faktor yang dilihat dalam penelitian ini yaitu dari budaya organisasi dan ketaatan perundang-undangan. Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang dimana dibantu dengan analisis menggunakan Nvivo12 plus. Hasil dari penelitian yang menggunakan Nvivo12 plus ini yaitu dalam dua instansi terkait berbeda hasilnya, seperti di Bappeda Sleman dari faktor yang dipakai budaya organisasi sangat signifikan berpengaruh yaitu 66% pengaruh terhadap proses akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dan untuk ketaatan perundang-undangan pengaruhnya yaitu 33%. Dan untuk sekretariat Bantul sendiri dari budaya organisasi yaitu 58% keterpengaruhan terhadap proses akuntabilitas kinerja organisasi dan untuk ketaatan perundang-undangan yaitu 41% pengaruh dalam proses akuntabilitas kinerja organisasi. Maka dalam penelitian yang dilakukan ini dari dua faktor yang mempengaruhi proses akuntabilitas kinerja organisasi ini sudah dapat dilihat hasil yang lumayan signifikan dari dua faktor tersebut bisa mempengaruhi hasil dari pada akuntabilitas kinerja yang dimana membuat proses kinerja meningkat dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: *akuntabilitas kinerja organisasi, faktor yang berpengaruh akuntabilitas.*

ABSTRACT

The results of the performance carried out by the government require an accountability report from the government in order to see the success made by the government in carrying out the performance which is to make the community prosperous. In this study, it looks at what are the factors that influence the performance accountability process of government agencies and the factors seen in this study, namely from organizational culture and compliance with laws. In this

study using qualitative analysis which is assisted by analysis using Nvivo12 plus. The results of this research using Nvivo12 plus are that in two related institutions the results are different, such as in Bappeda Sleman the factors used by organizational culture are very significant, namely 66% of the influence on the performance accountability process of government agencies and for compliance with legislation the effect is 33%. And for the Bantul secretariat itself from the organizational culture, namely 58% influence on the organizational performance accountability process and for compliance with legislation, namely 41% influence in the organizational performance accountability process. So in this research, from the two factors that influence the process of organizational performance accountability, it can be seen that quite significant results from these two factors can affect the results of performance accountability which makes the performance process increase in its implementation.

Keywords: *organizational performance accountability, factors that influence accountability.*

PENDAHULUAN

Secara terminologi, akuntabilitas merupakan suatu istilah yang diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan dimana dana publik itu di tetapkan atau penggunaan dana terkait program-program yang dijalankan sudah sesuai dengan apa yang sudah dirancang dan tanpa adanya permasalahan yang besar. Akuntabilitas administrasi merupakan suatu akuntabilitas yang memerlukan adanya hubungan hirarki yang jelas diantara pusat-pusat pertanggung jawaban dengan unit-unit dibawahnya. Hubungan hirarki ini biasanya telah ditetapkan dengan jelas baik dalam bentuk aturan organisasi yang disampaikan secara formal ataupun dalam bentuk jaringan hubungan informal (Wiwik Andriani, Irda Rosita, & Hidayatul Ihsan, 2015). Akuntabilitas selama ini dipahami hanya terbatas pada penyusunan laporan keuangan, bahkan

lebih sempit lagi yaitu hanya mencakup pertanggung jawaban anggaran. Akibatnya, entitas menganggap bahwa kewajiban mempertanggung jawabkan kegiatan secara memadai itu hanya sebatas melaporkan penggunaan dana, tanpa mengevaluasi manfaat dari kegiatan tersebut terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini tidak sejalan dengan harapan masyarakat atas kondisi ideal pemerintah sebagai penyelenggara negara yang mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Karena pertanggung jawaban pemerintah pada dasarnya mencakup kemajuan dari pada pelayanan atau program yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dengan maksud untuk melihat perbaikan untuk kemajuan pelayanan pemerintahan atau pelayanan sektor public (Meutia, 2015). Salah satu unsur peningkatan pelayanan pemerintah dari

Good Governace yaitu peningkatan akuntabiitas yang berdampak juga pada pemeberantasan korupsi bukan cuman hal dari pertanggung jawaban anggaran yang dibubat oleh pemerintah. Tetapi pertanggungjawaban terhadap segala bentuk pelayanan atau terkait program yang sudah dikerjakan yang dilakukan oleh pemerintah (Sadjiarto, 2000). Dengan demikian bahwa upaya peningkatan akuntabilitas dari pemerintah sangat-lah diperlukan guna meningkatkan pelayanan atau kinerja yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Akuntabilitas publik secara umum terdiri atas dua macam, pertama Akuntabilitas vertikal adalah pertanggung jawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggung jawaban unit-unit kerja (dinas atau organisasi pemerintah) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR/DPR dan juga pertanggungjawaban ke pada Presiden. Yang kedua, Akuntabilitas horizontal Sedangkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, artinya bahwa pemerintah harus memberikan pertanggung jawabannya kepada masyarakat luas guna memberikan pemahaman tentang apa yang sudah dilakukan atau program yang dikeluarkan oleh pemerintah. Di Indonesia tingkat akuntabilitas masih sangat rendah karena terbukti di tahun

2013 peringkat korupsi berada di tingkat 114 dari 177, maka harus di perlukakn peningkatan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dalam upaya perbaikan untuk dalam sebuah kinerja pemerintah untuk memberikan suatu pelayanan.

Dalam penelitian ini menganalisis terkait akuntabilitas kinerja dari pemerintah Kabupaten Sleman dan pemerintahan Kabupaten Bantul apakah sudah mencapai akuntabilitas kinerja instansi yang baik atau masih dalam perbaikan, karena akuntabilitas kinerja organisasi itu meraju pada proses pelayanan yang dilakukan guna mencapai good governance atau pemerintahan yang baik. Dan melihat factor apa saja yang berpengaruh pada akuntabilitas kinerja organisasi di pemerintahan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul dalam menjalankan roda pemerintahan yang baik atau memberikan pelayanan yang berkualitas pada masyarakat atau pelanggan. Dann untuk melihat capaian misi dan misi dari pada pamerintahan kabupaten sleman dan kabupaten Bantul sudah tercapai ataukah belum tercapai. Dalam penelitian ini factor akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan menganalisi factor akuntabilitas kinerja organisasi dengan menjadikan pengaruh budaya dan ketaatan kepada undang-undang untuk melihat apakah sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja organisasi atau tidak berpengaruh pada akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.

KAJIAN PUSTAKA

Akuntabilitas Pemerintahan Daerah Dalam Penyajian Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) Kota Padang Panjang di tulis oleh (Meutia, 2015), menyebutkan bahwa. Berdasarkan hasil pembahasan tentang akuntabilitas pemerintah daerah dalam penyajian informasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Padang Panjang, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas sudah berjalan dengan baik. Dimna pemerintah daerah Kota Padang Panjang konsekuen dengan komitmennya dalam mewujudkan Good Governance dalam lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Padang Panjang. Namun demikian masih terdapat kendala-kendala yang menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki kinerjanya. (Sawir, 2003) menyebutkan Dalam perspektif historis, akuntabilitas sebagai suatu system untuk menjelaskan dan memperlihatkan pencapaian misi yang ditetapkan. (Auditya Lucy & Lismawati, 2013) dalam penerapan konsep akuntabilitas kinerja dapat meningkatkan kinerja pemerintah, dalam penelitian ini menjelaskan akuntabilitas kinerja terkait pengelolaan keuangan daerah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Suryo Pratolo, 2008) penerapan akuntabilitas sangat mempengaruhi factor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintahan karena untuk pertanggung jawaban akan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah

daerah. (Riantiarno & Azlina, 2011) menyebutkan dalam penelitiannya terkait factor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dengan melihat penerapan akuntabilitas keuangan dan ketaatan terhadap pada peraturan daerah hasilnya pada variable yang akuntabilitas keuangan disebutkan bahwa tidak ada pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja yang dilakukan semenantara pada variable ketaatan perundang-undangan sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Dalam penelitian yang dilakukan (wingkan pambudi, 2016) menyebutkan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan variable kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja, tetapi pengendalian dan penerapan akuntansi sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintahan. Sementara dalam jurnal penelitian (Pituringih, 2015) memberikan bukti empiris bahwa SDM, SPI, dan TI merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan penerapan SAP berbasis akrual dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Banyak juga disebutkan dalam beberapa penelitian seperti (Ayem Sri, 2019) factor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja yaitu menunjukkan bahwa kejelasan target anggaran, kapasitas sumber daya manusia, dan pengendalian internal.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Putra, Akram, & Hermanto, 2018)

di sebutkan bahwa implementasi penganggaran berbasis kinerja, pengendalian internal, kejelasan sasaran anggaran dan pelaporan berpengaruh positif bagi akuntabilitas pemerintah daerah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Wiwik Andriani et al., 2015) disebutkan bahwa dalam penerapan akuntabilitas kinerja sangat penting karena untuk proses pertanggung jawaban dalam kinerja pemerintahan. Dalam penelitian ini hal-hal yang berbeda dengan penelitian yang terdahulu ada adanya upaya akuntabilitas yang bukan hanya sekedar dari bentuk penyajian pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pihak pemerintah tetapi juga sinkronisasi antara teori akuntabilitas dengan keadaan dilapangan dengan tujuan pemenuhan prinsip-prinsip Good Governance atau pemerintahan yang baik. Untuk penelitian yang lebih lanjut dari peneliti yaitu terkait dengan pengaruh akuntabilitas kinerja dalam komparatif Pemerintah Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman untuk melihat mana yang lebih efektif dan efisien dalam konsep akuntabilitas kinerja dalam pemerintahan.

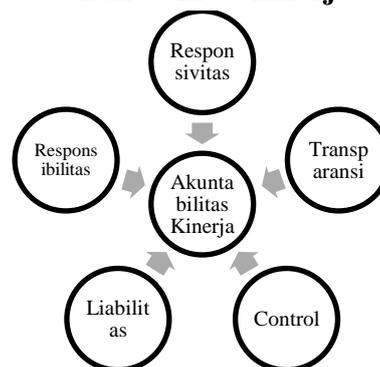
Kerangka Berfikir

1. Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Akuntabilitas merupakan pelaksanaan evaluasi atau penilaian mengenai standar pelaksanaan kegiatan tetapi akuntabilitas juga bisa diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu dalam organisasi yang dipercaya untuk dipercaya dalam

mengelola sumber daya dan yang menyangkut pertanggung jawaban sebagai control.

Bagan. 1 Indikator akuntabilitas Factor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja



Sumber: (Meutia, 2015)

Berdasarkan sejumlah variable akuntabilitas, maka variable akuntabilitas yang akan digunakan dalam tulisan ini adalah pengendalian terhadap organisasi publik pada level organisasional yang dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memberikan penjelasan kepada berbagai pihak baik dari internal maupun eksternal yang berkepentingan melakukan penilaian dan evaluasi terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik tersebut (Meutia, 2015).

- a. Transparansi yang merujuk pada kemudahan akses untuk mendapat informasi terkait dengan fungsi dan kinerja dari organisasi.
- b. Liabilitas yang merujuk pada praktik untuk memastikan individu dan atau organisasi bertanggung jawab atas tindakan dan aktivitasnya, memberikan hukuman pada tindakan yang salah dan memberikan

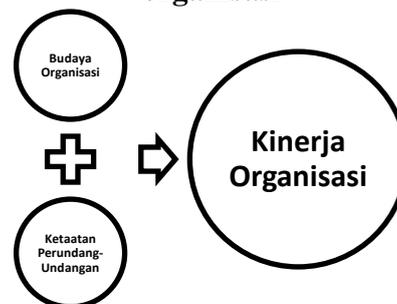
penghargaan atas kinerja yang baik.

- c. Control individu (birokrat) yang akuntabel dibatasi oleh perintah dari para principal. Namun, birokrat dan organisasi dibatasi oleh hukum, peraturan, dan norma-norma. Dalam pemahaman kontrol, apabila sebuah lembaga birokrasi mendapatkan perintah maka akuntabilitas dinilai berdasarkan kepatuhan dalam melaksanakan perintah tersebut.
- d. Responsibilitas merupakan kecakapan organisasi dalam menyelenggarakan kegiatan organisasinya dimana organisasi dikatakan akuntabel jika telah mengikuti segenap peraturan yang ada.
- e. Responsivitas cenderung menekankan pendekatan yang berorientasi pelanggan yang berfokus pada tuntutan dari pihak yang dilayani serta kebutuhan atau sasaran-sasaran substantif organisasi. Organisasi dikatakan akuntabel jika mampu memenuhi kebutuhan dari populasi yang dilayaninya. Dari kelima dimensi yang sudah di jelaskan berikut adalah upaya untuk bagaimana akuntabilitas organisasi mengukur sejauh mana kemampuan sektor publik menjalankan pertanggung jawaban terhadap kinerja yang sudah dilakukan oleh organisasi pemerintahan

2. Faktor Yang Mempengaruhi kinerja organisasi Daerah

Akuntabilitas organisasi pemerintahan daerah dalam penelitian yang dilakukan oleh (Mulyani & Surabaya, 2017) di sebutkan bahwa factor organisasi (budaya organisasi) sangat mempengaruhi perkembangan system pengukuran kinerja pemerintahan daerah. Sementara dalam jurnal penelitian (Indrayani, Diatmika, & Wahyuni, 2017) komitmen organisasi sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja organisasi public. Factor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja organisasi dalam penelitian (Riantiarno & Azlina, 2011) bahwa ketaatan pada perundang-undangan sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja organisasi pemerintah daerah.

Bagan. 2 Variable dari kinerja organisasi



Sumber: (Indrayani et al., 2017; Riantiarno & Azlina, 2011)

a. Factor Budaya Organisasi

Budaya organisasi sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja organisasi pemerintah daerah karena budaya organisasi membentuk kepribadian individu organisasi yang mengarah kepada sikap dan perilaku positif dan budaya organisasi sangat

berpengaruh terhadap pengembangan dan implementasi system pengukuran kinerja organisasi.

b. **Factor Ketaatan Perundang-Undangan**

Ketaatan perundang-undangan adalah salah satu factor dari akuntabilitas karena peraturan perundang-undangan lah yang menjadi acuan bagi pertanggung jawaban kinerja organisasi pemerintahan. Maka dari itu penerapan akuntabilitas kinerja organisasi harus didasari oleh perundang-undangan dan untuk memperjelas sasaran dan tujuan dari akuntabilitas kinerja organisasi pemerintah daerah.

METODE

Metode dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Teknik analisis kualitatif yang dimana menggunakan data-data wawancara dan dokumen yang ada di dalam laporan kinerja pemerintahan dalam upaya pertanggung jawaban kinerja instansi pemerintahan dalam melaksanakan program-program yang dilakukan oleh pemerintah. Dan dalam penelitian ini di khususkan untuk mengkomparasikan dua instansi pemerintahan yang melihat apa yang menjadi faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintahan.

1. Populasi Semple

Populasi dalam penelitian ini adalah beberapa organisasi pemerintahan kabupaten Bantul di sekretaris daerah dan bappeda kabupaten sleman. sedangkan sample

ialah pegawai eselon 3 dan eselon 4 di sekretaris daerah kabupaten Bantul dan bappeda kabupaten sleman. Penelitian ini dilakukan atas tujuan tertentu, oleh sebab itu Teknik pemilihan sample yang digunakan ialah purposive sample. Dari teori yang didapatkan dalam penelitian ini dengan menganalisis factor pengaruh akuntabilitas kinerja komparasi pemerintahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Factor Pengaruh Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Dalam melihat factor pengaruh akuntabilitas kinerja organisasi dalam penelitian ini memakai beberapa indicator yang menjadi analisis penelitiannya adalah melalui beberapa prinsip dari akuntabilitaas kinerja organisasi

- a. Transparansi yang merujuk pada kemudahan akses untuk mendapat informasi terkait dengan fungsi dan kinerja dari organisasi.
- b. Liabilitas yang merujuk pada praktik untuk memastikan individu dan atau organisasi bertanggung jawab atas tindakan dan aktivitasnya, memberikan hukuman pada tindakan yang salah dan memberikan penghargaan atas kinerja yang baik.
- c. Control individu (birokrat) yang akuntabel dibatasi oleh perintah dari para principal. Namun, birokrat dan organisasi dibatasi oleh hukum, peraturan, dan norma-norma. Dalam pemahaman kontrol, apabila sebuah lembaga

birokrasi mendapatkan perintah maka akuntabilitas dinilai berdasarkan kepatuhan dalam melaksanakan perintah tersebut.

- d. **Responsibilitas** merupakan kecakapan organisasi dalam menyelenggarakan kegiatan organisasinya dimana organisasi dikatakan akuntabel jika telah mengikuti segenap peraturan yang ada.
- e. **Responsivitas** cenderung menekankan pendekatan yang berorientasi pelanggan yang berfokus pada tuntutan dari pihak yang dilayani serta kebutuhan atau sasaran-sasaran substantif organisasi. Organisasi dikatakan akuntabel jika mampu memenuhi kebutuhan dari populasi yang dilayaninya. Dari kelima dimensi yang sudah di jelaskan berikut adalah upaya untuk bagaimana akuntabilitas organisasi mengukur sejauh mana kemampuan sektor publik menjalankan pertanggung jawaban terhadap kinerja yang sudah dilakukan oleh organisasi pemerintahan

Maka dalam hal melihat factor akuntabilitas kinerja pemerintahan transparansi, liabilitas, control individu, responsibilitas dan responsivitas sangat mempengaruhi kegiatan akuntabilitas kinerja yang dilakukan agar bisa menjadikan akuntabilitas kinerja yang baik karena dapat melihat keberhasilan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah dalam

memberikan tanggung jawab kepada masyarakat dalam melihat kinerja pemerintah yang sudah dilakukan. Seperti yang dilakukan di pemerintahan sekertaris daerah kabupaten Bantul dan Bappeda Sleman menurut prinsip dari pada akuntabilitas kinerja organisasi yang dilakukan pemerintah.

Factor Yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Daerah

Dari hasil yang dapat ditentukan meruju pada beberapa factor yang mempengaruhi kinerja organisasi seperti:

- a. **Factor Budaya Organisasi:** Budaya organisasi sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja organisasi pemerintah daerah karena budaya organisasi membentuk kepribadian individu organisasi yang mengarah kepada sikap dan perilaku positif dan budaya organisasi sangat berpengaruh terhadap pengembangan dan implementasi system pengukuran kinerja organisasi.
- b. **Factor Ketaatan Perundang-Undangan :** Ketaatan perundang-undangan adalah salah satu factor dari akuntabilitas karena peraturan perundang-undangan lah yang menjadi acuan bagi pertanggung jawaban kinerja organisasi pemerintahan. Maka dari itu penerapan akuntabilitas kinerja organisasi harus didasari oleh perundang-undangan dan untuk memperjelas sasaran dan

tujuan dari akuntabilitas kinerja organisasi pemerintah daerah.

Bappeda Sleman

Hasil program atau kegiatan yang dilakukan oleh Bappeda Sleman sendiri beberapa kegiatan menghasilkan keberhasilan yang dilihat dari presentase target yang ditetapkan oleh Bappeda Sleman sendiri rata-rata telah berhasil dilakukan dengan melihat hasil capaian yang sudah dilakukan. Menurut kepala bappeda sendiri capaian dari pada akuntabilitas kinerja dalam melaksanakan kegiatan telah berhasil dilakukan dengan hasil yang sangat memuaskan. Itu karena anggota dari bappeda sendiri melihat bahwa budaya organisasi di Bappeda Sleman sendiri karena mempunyai seorang pemimpin atau kepala bappeda yang dimana sangat tegas melihat kinerja yang dilakukan dengan profesionalitas kinerja yang baik dan benar. Dengan catatan sesuai dengan aturan organisasi yang berlaku di dalam peraturan undang-undang dan atau peraturan yang dikeluarkan lainnya. Karena itu pengaruh terhadap ketaatan perundang-undangan dan budaya organisasi sangat lah signifikan pengaruhnya karena bisa melihat kinerja organisasi yang dilakukan itu buruk atau baiknya kinerja yang dilakukan.

Tabel. 1 Indikator Capaian Kinerja Bappeda

No	INDIKAT	CARA PERHITUNGAN	TANGGET 2018
	OR KINERJA UTAMA (IKU)		
1	Predikat (nilai)	Predikat atau nilai atas hasil evaluasi	A (4)

	sakip bappeda	akuntabilitas kinerja instansi pemerintah oleh Inspektorat	
2	Presentasi usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD	Jumlah kegiatan dan atau output kegiatan usulan masyarakat yang tercantum di Berita Acara Kesepakatan Musrenbang RKPD di Kecamatan yang masuk di APBD dibagi jumlah kegiatan dan atau output kegiatan usulan masyarakat yang tercantum di Berita Acara Kesepakatan Musrenbang RKPD di Kecamatan kali 100%	84%
3	Presentase indikator capaian kinerja sasaran daerah dalam RPJMD yang mencapai target	jumlah indikator kinerja sasaran daerah yang mencapai target dibagi jumlah seluruh indikator kinerja sasaran daerah kali 100% (indikator kinerja sasaran daerah adalah	85%

		sebagaimana yang tercantum dalam dokumen RPJMD)	
4	Presentase capaian program daerah di RKPD dengan predikat kinerja tinggi	jumlah SKPD dengan hasil renja predikat kinerja tinggi dibagi jumlah seluruh SKPD kali 100%	85%
5	Prsentase temuan hasil pemeriksa yang ditindak lanjuti	jumlah temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti dibagi seluruh hasil temuan pemeriksaan kali 100%	100%
6	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan bappeda	jumlah pengguna layanan yang puas dibagi jumlah seluruh pengguna layanan yang di survey kali 100%	80

(Sumber: LKJIP BAPPEDA SLEMAN 2018)

Dalam hal ini capaian kinerja organisasi yang dilakukan di bappeda sleman ada beberapa factor pendukung yang dimana sangat berpengaruh terhadap capain kinerja organisasi dan ada peraturan yang mengatur terkait organisasi pemerintahan kabupaten sleman yaitu dengan dikeluarkannya aturan dari bupati sleman sendiri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Road Map Penerapan Reformasi Birokrasi Kabupaten Sleman. Aturan ini sangat

berguna bagi melihat keberhasilan kinerja organisasi daerah dalam melakukan kegiatan atau program yang menjadi acuan terhadap kinerjanya. Ada factor pendorong terhadap keberhasilan yang dilakukan atau pencapaian sasaran yaitu yang pertama adalah Dilakukan pemantauan secara periodik terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, yang kedua adalah Instrumen pelaksanaan reformasi birokrasi telah dibuat dengan jelas dan rinci. Disini sudah dilihat bahwasannya kinerja organisasi dari bappeda sleman sendiri sudah berhasil dilakukan dengan benar untuk memenuhi kebutuhan dari kinerja organisasi dari pada bappeda sleman sendiri. Dan sudah terbukti dari hasil kinerja organisasi dari bappeda sendiri selama 5 tahun program pembangunan yang dilakukan bappeda sleman sudah berjalan dengan baik dengan mengutamakan akuntabilitas kinerja dari bappeda sleman. Dari hasil kinerja organisasi bappeda sleman ini dalam hal factor pendorong atau pengaruh akuntabilitas kinerja organisasi bappeda sleman ini sudah mencapai target dengan realisasi sebesar 81,81% dari target 78,00%.

Sekretariat Daerah Bantul

Sementara di secretariat daerah kabupaten Bantul sendiri untuk melihat keberhasilan program atau kegiatan yang dilakukan oleh anggota organisasi atau anggota dari pada Lembaga terkait memang tidak lepas dari factor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah dengan untuk mendorong tatakelola

pemerintahan yang baik maka instansi pemerintahan harus memberikan laporan terkait kinerja dalam memberikan pelayanan public yang baik dan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan agar kinerja organisasi semakin baik. Dan dengan adanya aturan yang dikeluarkan atau peraturan pemerintah terkait laporan pertanggung jawaban atau laporan akuntabilitas kinerja organisasi. Untuk melihat apa yang menjadi factor dari pada keberhasilan kinerja yang dilakukan terlebih dahulu harus melihat dari pada visi, misi dan tujuan dari pada kegiatan yang dilakukan oleh sekretariat daerah kabupaten Bantul ini. Dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja menggunakan pendekatan dengan prinsip good governance karena salah satu syarat untuk menilai keberhasilan dari pada akuntabilitas kinerja organisasi. Dalam akuntabilitas kinerja organisasi pemerintah daerah kabupaten Bantul ini berpedoman kepada peraturan presiden nomor 29 tahun 2014 tentang system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Capaian indicator dari kinerja sekretariat daerah kabupaten Bantul sendiri pada tahun 2018 sangat berhasil apabila dilihat dari targetan yang dilakukan oleh sekretariat daerah kabupaten Bantul sendiri nilai yang

sangat memuaskan walaupun masih ada yang belum dapat tercapai dengan apa yang ditargetkan dan dengan kegiatan yang dilakukan atau kinerja yang dilakukan oleh sekretariat daerah kabupaten Bantul berikut tabel dari capaian indicator kinerja sekretariat daerah Bantul.

Tabel. 2 Capaian Indicator Kinerja Utama Tahun 2018

No	Indicator Kinerja	Tahun 2018		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	83 (A)	81,39 (A)	98,06 %
2	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	3,5 (Sangat Tinggi)	3,2429 (Sangat Tinggi)	92,65 %
3	Nilai Evaluasi Kinerja	72	76,19	105,82 %
4	Persentase Belanja Pegawai	49	43,46*	88,69 %
5	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	88,70	100,83 %

Sumber: Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 2018

Nilai tersebut bisa dikatakan bahwa sekretariat daerah kabupaten Bantul sendiri sudah melakukan upaya perbaikan dalam tatakelola pemerintahan daerah seperti dalam prinsip good governance yaitu transparansi, liabilitas, control, responsibilitas, dan responsivitas. Dan di instansi terkait sekretariat daerah

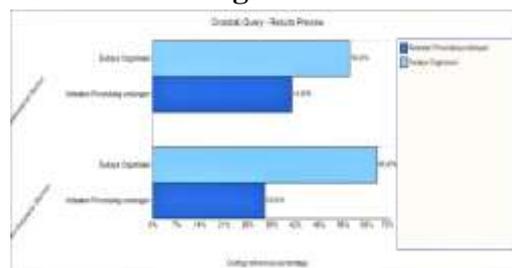
kabupaten Bantul sendiri target yang ditetapkan di tahun 2018 ini dengan nilai 83 (kategori A) realisasi dari pada secretariat daerah kabupaten bantul mendapatkan nilai 81,39 (kategori A) sudah tercapai 98,06% maka bisa dikatakan sangat tinggi. Dan mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai 2018 yaitu sebesar 3, 49point nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan secretariat daerah kabupaten Bantul. Nilai tersebut juga meenunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi dari pada pengguna anggaran dan kinerja yang dilakukan oleh secretariat kabupaten bantulk sendiri.

Hasil Nvivo12 Plus

Dalam penelitian ini alat untuk menganalisis untuk melihat factor yang sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja organisasi adalah yang pertama budaya organisasi yaitu untuk membentuk kepribadian individu organisasi yang mengarah kepada sikap dan prilaku positif dan budaya organisasi sangat berpengaruh terhadap pengembangan dan implementasi system pengukuran kinerja organisasi hal ini menunjukkan bahwa pengaruhnya sangat kuat terhadap kinerja organisasi. Dan yang kedua adalah ketaatan pada perundang-undangan yaitu factor yang menjadi acuan bagi pertanggung jawaban kinerja organisasi pemerintahan. Maka dari itu penerapan akuntabilitas kinerja organisasi harus didasari oleh perundang-undangan dan untuk memperjelas sasaran dan tujuan dari akuntabilitas kinerja organisasi pemerintah daerah. Antara budaya

organisasi dan ketaatan perundang-undangan sangat berkaitan satu sama lain sehingga dapat menciptakan suatu akuntabilitas kinerja organisasi yang baik. Disini digunakan alat untuk melihat factor yang sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja organisasi menggunakan softwere aplikasi nvivo 12 plus yang dimana data yang didapatkan dari hasil coding manual didapatkan dari beberapa hasil wawancara dan juga dari beberapa jurnal terkait factor pengaruh akuntabilitas kinerja organisasi.

Gambar. 1 Pengaruh Akuntabilitas



Sumber: Nvivo 12 plus

Diliat dari gambar diatas sudah menunjukkan faktor yang paling sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja organisasi pemerintah daerah, seperti yang di disebutkan oleh secretariat daerah kabupaten Bantul dan bappeda kabupaten sleman diatas bahwa pengaruh dari budaya organisasi sangat signifikan karena bisa memunculkan kinerja yang baik terhadap akuntabilitas kinerja organisasi. Hal ini merupakan sebuah inti dari pada pelaksanaan akuntabilitas di pemerintahan dalam upaya mencapai kinerja instansi pemerintahan menjadi lebih baik lagi. Maka dari itu upaya pemerintah dalam melakukan akuntabilitas harus memang dibarengi

dengan kualitas dari pada anggota organisasi pemerintahannya guna memberikan kinerja kedepannya lebih baik lagi tanpa adanya kelasahan yang terus berulang-ulang dan tanpa adanya kesalahan yang dilakukan lagi oleh pemerintah dalam memberikan suatu pelayanan atau program kepada masyarakat. Hasil analisis dalam digram diatas bahwa hasil dari pengaruh akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan di pengaruhi oleh dua faktor yang dimana dapat mempengaruhi kinerja dari pada pemerintahan.

Seperti yang dikatakan oleh secretariat Bantul dan bappeda sleman diatas faktor yang paling mempengaruhi dalam kegiatan akuntabilitas dari pemerintahan sendiri yaitu faktor budaya organisasi yang dimana budaya yang ada dalam organisasi sangat mempengaruhi kuat dalam kegiatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan seperti, budaya yang ada dalam organisasi diantaranya kepemimpinan dari pada kepala dinas atau kepala instansi pemerintahan, yang diaman budaya pemimpin yang ada akan sangat mempengaruhi akuntabilitas dalam membangun kinerja organisasi yang lebih baik. Namun faktor yang kedua ketaatan perundang-undangan, memang juga mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan akan tetapi dalam instansi pemerintahan semua yang dilakukan oleh pemerintah adalah diatur oleh peraturan yang mengatur dalam undang-undang, dan juga prosedur yang

ada dalam undang-undang harus dilakukan oleh pemerintahan.

KESIMPULAN

Dari kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah menerangkan terkait faktor yang sangat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan yang dimana melihat apa saja yang menjadi pengaruh yang mendasar terjadinya akuntabilitas kinerja yang baik dan benar, dan juga melihat faktor keberhasilan apa saja yang sangat signifikan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah dalam penelitian ini di bappeda sleman dan sekertariat Bantul. Hasil dari penelitian ini yaitu dengan melihat variable dari pada akuntabilitas kinerja organisasi dan juga melihat faktor yang sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, hasil yang didapatkan dari analisis menggunakan aplikasi Nvivo12 plus disini menunjukkan hasil yang dimana faktor yang mempengaruhi akuntabilitas ada dua faktor yaitu budaya organisasi dan ketaatan perundang-undangan yang dimana sangat memepengaruhi hasil dari pada analisis yang dimana budaya organisasi sangat besar persentasenya dalam mempengaruhi akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan.

a. Di Bappeda Sleman faktor budaya organisasi sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah yakni 66% sangat signifikan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja

organisasi dalam bappeda sleman, dan untuk ketaatan perundang-undangan dari pada bappeda Bantul keterpengaruhan untuk proses akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah yaitu di bappeda sleman yakni 33% kalo dilihat pengaruh dari pada dua faktor berikut tidak besar tetapi ada keterpengaruhan yang kuat dalam mproses akuntabilitas kinerja pemerintahan sendiri . Sementara di secretariat daerah Bantul juga lebih dari 50% yaitu 58% keterpengaruhan budaya organisasi dari akuntabilitas kinerja organisasi pemerintah daaerah dan ketaatan perundang-undangan dari organisasi pemerintahan daerah khususnya di secretariat Bantul sendiri adalah 41% ini juga bisa dikatakan berpengaruh terhadap proses akuntabilitas kinerja organisasi dari secretariat daerah Bantul.

DAFTAR PUSTAKA

- Auditya Lucy, H., & Lismawati. (2013). *Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. 3, 21–41.
- Ayem Sri, F. A. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel moderasi*.
- Indrayani, L. F., Diatmika, P. G., & Wahyuni, M. A. (2017). *Pengaruh Komitmen Organisasi, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Publik (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar)*. E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, 8(2).
- Meutia, E. (2015). *Akuntabilitas Pemerintah Daerah Dalam Penyajian Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Ilppd) Kota Padang Panjang*.
- Mulyani, N. T., & Surabaya, U. N. (2017). *Pengaruh Faktor Teknis Dan Keorganisasian Terhadap Pengembangan Sistem Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah : Penggunaan*. 3(4).
- Pituringasih, E. (2015). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu)*. 3, 62–73.
- Putra, A. P., Akram, A., & Hermanto, H. (2018). *Determinan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Di Kabupaten Lombok Barat*. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 2(2), 271. <https://doi.org/10.24034/j254850>

- 24.y2018.v2.i2.3942
- Riantiarno, R., & Azlina, N. (2011). *Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah*. *Pekbis Jurnal*, 3(3), 560–568.
- Sadjiarto, A. (2000). *Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dan Pengawasan Keuangan Daerah*. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 138–150.
<https://doi.org/10.9744/jak.2.2.pp.138-150>
- Sawir, M. (2003). *Konsep Akuntabilitas Publik*. *Ekonomi Dan Bisnis*, 9–18.
- Suryo Pratolo. (2008). *Transparansi Dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dalam Hubungannya Dengan Perwujudan Keadilan Dan Kinerja Pemerintah Daerah: Sudut Pandang Aparatur Dan Masyarakat Di Era Otonomi Daerah*. *Jurnal Akuntansi Dan Investas*, 9(2), 108–124.
- wingkan pambudi, henny murtini. (2016). *determinan akuntabilitas kinerja (studi kasus pada instansi pemerintah kabupaten semarang)*. 32–40.
- Wiwik Andriani, Irda Rosita, & Hidayatul Ihsan. (2015). *Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) dalam Mewujudkan Good Governance pada Politeknik Negeri Padang*. *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, 10(2), 51–60.